

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di seluruh dunia, baik negara maju maupun berkembang selalu memperhatikan pembangunan dalam negaranya. Unsur pembangunan yang mampu mendukung kemajuan dari sebuah negara salah satunya sumber daya manusia. Meskipun suatu negara kaya akan sumber daya alam tetapi kekurangan sumber daya manusia, maka akan sulit bagi negara tersebut untuk mengalami kemajuan. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tentunya akan membantu dalam pengelolaan kekayaan yang dimiliki suatu negara. Karena tujuan dari pembangunan manusia adalah menciptakan suatu lingkungan yang kondusif dan mendukung manusia agar dapat menikmati hidup yang lama, sehat, dan kreatif (Sukirno, 2015)

Besar kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya yang dimilikinya. Baik itu sumber daya fisik (*physical resources*) atau kekayaan alam (berupa tanah yang subur, kandungan mineral berharga dan bahan mentah bernilai ekonomis lainnya) maupun sumber daya manusia (*human resources*), jumlah penduduk serta tingkat keterampilan atau pendidikannya (Todaro, 2003)

United Nation Development Program (UNDP) sebagai badan program pembangunan PBB telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu tolak ukur angka

kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi angka harapan hidup pada waktu lahir, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. (UNDP, 1990).

Tingginya nilai IPM menggambarkan keseriusan dan keberhasilan pemerintah dalam melakukan investasi pembangunan yang berpusat pada manusia (*human centered development*) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat (Nurbaeti, 2013).

Pada tahun 2010 hingga 2019 Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat berada di atas rata-rata nasional. Provinsi Sumatera Barat menempati nomor urut 9 provinsi dengan IPM tertinggi nasional dengan angka 72,39. Dengan demikian dapat dikatakan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat selalu meningkat setiap tahunnya dengan peningkatan sebesar 0,66 poin atau 0,92 persen.

Gambar 1. 1
Perkembangan IPM di Kota Padang



Sumber: BPS Kota Padang

Grafik diatas menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Padang dari tahun 2011 hingga 2020. Hal ini tentunya menunjukkan terjadinya perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Padang ke arah yang lebih baik setiap tahunnya. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 82,82 %. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan pada setiap indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia diantaranya kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Pada tahun 2013 pertumbuhan IPM di Kota Padang sempat mengalami penurunan, namun kembali naik pada tahun berikutnya. Peningkatan ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah dalam mengelola alokasi pengeluaran. Melalui berbagai program yang di rancang untuk mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana, sebagai penunjang pembangunan manusia di daerah terutama sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

APBD disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya APBD, maka suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dan perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sedangkan belanja dilakukan oleh daerah dalam bentuk belanja daerah (BPS, 2019).

Sejak di berlakukannya otonomi daerah, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerahnya sendiri. Setiap anggaran yang dikeluarkan diharapkan dapat membantu dan menunjang setiap kebutuhan vital suatu daerah terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal pokok untuk mencapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya merupakan hal penting untuk membentuk kapabilitas manusia lebih luas yang berada pada makna inti pembangunan (Todaro, 2011).

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dialokasikan untuk menunjang pelayanan kesehatan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan suatu daerah. Selain itu pengeluaran pemerintah bidang kesehatan diharapkan memberi kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan seperti, tenaga medis, obat-obatan, pembiayaan, pembekalan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Data BPS menunjukkan bahwa angka harapan

hidup di Kota Padang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan membaiknya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi yang mendukung. Tercatat rata-rata masyarakat Kota Padang yang lahir pada tahun 2015-2020 dapat menjalani hidup hingga usia 73 tahun. Ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Faktor pendorong terjadinya peningkatan standar kesehatan ini diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat (BPS, 2021).

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan diprioritaskan untuk menunjang pendidikan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat mampu berkontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah yang dihitung dari usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah di Kota Padang tahun 2020 sebesar 11,58. Dengan kata lain angka ini menunjukkan bahwa penduduk di Kota Padang bisa menikmati pendidikan rata-rata sampai kelas 2 SLTA. Angka ini sudah memenuhi target program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah yaitu menyelesaikan pendidikan dasar selama 9 tahun. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih mengupayakan peningkatan pendidikan agar masyarakat termotivasi untuk bersekolah (BPS, 2020).

Pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial dialokasikan untuk menunjang program-program perlindungan sosial. Anggaran perlindungan sosial

melindungi seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat dari guncangan kerentanan sosial agar keberlangsungan hidupnya dapat terpenuhi. Besarnya anggaran perlindungan sosial digunakan untuk mendanai program-program pemerintah seperti Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan, Indonesia Pintar, dan masih ada beberapa program lagi yang akan diinisiasi. Program-program ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan komprehensif. Terbukti selama periode 2011-2020 perkembangan persentase kemiskinan di kota padang mengalami penurunan (BPS, 2020).

Dengan tercapainya pembangunan manusia yang berkualitas dan pembangunan perekonomian yang terus meningkat, maka kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat akan tercapai. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Padang periode 2011-2020. karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial Terhadap IPM di Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap IPM di Kota Padang?

2. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM di Kota Padang?
3. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial terhadap IPM di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap IPM di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial terhadap IPM di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik bersifat akademik maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas serta menambah pengetahuan dalam peningkatan pembangunan manusia.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi pihak terkait yang berkepentingan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan, literatur tambahan informasi, serta objek pertimbangan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial terhadap IPM di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan data time series periode 2011-2020 dalam bentuk data tahunan, dengan metode analisis regresi linear berganda.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan pada penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini di uraikan jenis penelitian, data dan sumber data, penjelasan mengenai model penelitian, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas tentang gambaran umum wilayah penelitian, keadaan geografis, demografi, serta perkembangan variabel-variabel dalam penelitian.

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang menjelaskan estimasi serta interpretasi hasil penelitian.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dalam penelitian, serta saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini.